

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

Moch. Rochjadi Hafiluddin¹, Suryadi^{1,2}, Choirul Saleh^{1,2}

¹Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

²Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Abstrak

Melihat kondisi eksisting UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang belum mempunyai sentra atau kampung-kampung UMKM dalam jenis usahanya seperti di kecamatan lainnya, maka keberhasilan pengembangan dan kemajuan usaha dalam pemberdayaannya perlu dipikirkan strategi yang tepat. Untuk itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tepat adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Komunitas UMKM yang ada di Kecamatan Sukodono adalah, Komunitas Usaha dalam skala mikro dengan jumlah 4.410 pelaku, skala kecil dengan jumlah 968 pelaku dan skala menengah dengan jumlah 327 pelaku. Yang merupakan prioritas penting dan mendesak (Prioritas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 4.410 pelaku (77,3%). Selain itu pelaku UMKM pada skala mikro memiliki problema yang dihadapi sangat kompleks dan sumberdaya yang dimiliki sangat besar dan potensial, problema yang utama dihadapi adalah masalah Sumber daya Manusia (SDM). Selanjutnya pada skala prioritas II yaitu Mendesak tapi tidak penting dilakukan pada UMKM dengan skala kecil dengan jumlah pelaku sebanyak 968 pelaku (17%) karena para pelaku UMKM pada skala ini memiliki problema tidak sekomplek yang dihadapi pada pelaku UMKM skala mikro dan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki SLTA ke atas, dengan asumsi aspek SDM sudah jarang ditemui problema yang kompleks. Problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah permodalan dan pemasaran. Sedangkan pada skala prioritas III yaitu Penting tetapi tidak mendesak dilakukan pada UMKM dengan skala menengah karena memang jumlahnya tidak sebanyak pada pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Walaupun demikian juga perlu dilakukan pemberdayaannya agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang kuat di bursa pasar yang penuh persaingan di era global saat ini.

Kata kunci: Komunitas Usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Abstract

Looking at the existing condition of UMKM in Sukodono Subdistrict Sidoarjo Regency which hasn't owned the UMKM centra or villages in its kind of business, therefore it needs to be thought about the suitable strategy to succeed the development and business progress in its empowerment. The empowerment strategy for UMKM agents in Sukodono Subdistrict that Sidoarjo regency government will do is the approaching UMKM empowerment strategy based on community. The UMKM community in Sukodono subdistrict consists of Business Community in micro level with 4.410 agents, small level with 968 agents, and middle level with 327 agents. The one which is important and urgent priority (priority I) is done to the UMKM agents in micro level because the number of agents is the most in Sukodono subdistrict with 4.410 or 77,3%. Besides, the UMKM agents in micro level have complicated problems and many potential human resources. The main problem is on the human resources. While the priority II which is urgent but unimportant is done to the UMKM agents in small level with the number of agents 968 or 17%, because the problems faced on this level are not as complicated as the one of micro level and the education rate is more than senior high school level, which has assumption that it is rarely found complicated problems on the human resources. The problems faced on this level are financial capital and marketing. The priority III which is important but not urgent is done to the UMKM agents in middle level because the number of agents is less than those in micro and small levels. Nevertheless, the empowerment needs to be done too on this level so that it has strong bargaining position and competitiveness in the stock market which is full of competition on this globalization era.

Keyword: business community, empowerment strategy

Corresponding Address:

Moch. Rochjadi Hafiluddin

Email : hafiluddin.rochjadi@gmail.com

Alamat : Wisma Delta 19 Sekardangan Sidoarjo

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Pertumbuhan sektor UMKM saat ini nampak menggembirakan. Peranan dan kegiatan usaha sektor UMKM sejak krisis ekonomi melanda negeri kita. Mengingat UMKM sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional maka perlu dilakukan strategi dalam upaya pemberdayaan pada sektor tersebut. Kebijakan pemberdayaan sektor UMKM diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor.

Strategi penyelamatan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain dengan dicanangkannya sentra UMKM sebagai sentra wisata industri di beberapa kecamatan. Adapun sentra-sentra tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pencanaan Sentra Batik di Kecamatan Sidoarjo atau "Kampoeng Batik Jetis" yang diresmikan oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 3 Mei 2008 dengan jumlah pengrajin batik sebanyak 30 orang.
- b. Pencanaan Sentra Krupuk "Kampoeng Kroepoek" di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon yang diresmikan oleh Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2008 dengan jumlah pembuat krupuk sebanyak 52 orang.
- c. Pencanaan Sentra sepatu-sandal "Kampoeng Sepatu" Mojosantren-Kemasan Krian yang diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2008 dengan jumlah pengrajin sebanyak 70 orang.
- d. Pencanaan Sentra Makanan Olahan "Kampoeng Jajanan" di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung yang diresmikan oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah pembuat jajanan sebanyak 35 orang.

Kekuatan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dinilai dari komoditas unggulannya, tetapi juga wilayahnya yang strategis, Bandara International Juanda dan Terminal Bus Antarprovinsi Bungurasih terletak di Kabupaten Sidoarjo. Akses jalan tol ke Pelabuhan Tanjung Perak juga sangat mudah sehingga masyarakat dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri gampang menjangkau Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Kabupaten Sidoarjo sebagai kota satelit Surabaya

menyimpan beragam sumberdaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,08 persen, kondisi ini diiringi pula dengan pengembangan bisnis usaha yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan strategi pemberdayaannya, utamanya para pelaku UMKM itu sendiri dalam merebut dan menciptakan daya saing bagi produk-produknya dipasaran. Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang perkembangannya diproyeksikan menjadi kota baru juga memiliki potensi sumberdaya yang cukup potensial, terutama dalam hal keberadaan pelaku UMKMnya. Kecamatan Sukodono memiliki 5.705 UMKM yang mempunyai bermacam-macam sektor jenis usaha yang diusahakan, walaupun tidak tersentra dalam kampung-kampung UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan UMKM di Kecamatan Sukodono masih membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan untuk itu diperlukan strategi dalam upaya pemberdayaannya. Karena itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kekuatan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dinilai dari komoditas unggulannya, tetapi juga wilayahnya yang strategis, Bandara International Juanda dan Terminal Bus Antarprovinsi Bungurasih terletak di Kabupaten Sidoarjo. Akses jalan tol ke Pelabuhan Tanjung Perak juga sangat mudah sehingga masyarakat dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri gampang menjangkau Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Kabupaten Sidoarjo sebagai kota satelit Surabaya menyimpan beragam sumberdaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,08 persen, kondisi ini diiringi pula dengan pengembangan bisnis usaha yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan strategi pemberdayaannya, utamanya para pelaku UMKM itu sendiri dalam merebut dan menciptakan daya saing bagi produk-produknya dipasaran. Kecamatan Sukodono merupakan

salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang perkembangannya diproyeksikan menjadi kota baru juga memiliki potensi sumberdaya yang cukup potensial, terutama dalam hal keberadaan pelaku UMKMnya. Kecamatan Sukodono memiliki 5.705 UMKM yang mempunyai bermacam-macam sektor jenis usaha yang diusahakan, walaupun tidak tersentra dalam kampung-kampung UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan UMKM di Kecamatan Sukodono masih membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan untuk itu diperlukan strategi dalam upaya pemberdayaannya. Karena itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Kekuatan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dinilai dari komoditas unggulannya, tetapi juga wilayahnya yang strategis, Bandara International Juanda dan Terminal Bus Antarprovinsi Bungurasih terletak di Kabupaten Sidoarjo. Akses jalan tol ke Pelabuhan Tanjung Perak juga sangat mudah sehingga masyarakat dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri gampang menjangkau Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Kabupaten Sidoarjo sebagai kota satelit Surabaya menyimpan beragam sumberdaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,08 persen, kondisi ini diiringi pula dengan pengembangan bisnis usaha yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan strategi pemberdayaannya, utamanya para pelaku UMKM itu sendiri dalam merebut dan menciptakan daya saing bagi produk-produknya dipasaran. Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang perkembangannya diproyeksikan menjadi kota baru juga memiliki potensi sumberdaya yang cukup potensial, terutama dalam hal keberadaan pelaku UMKMnya. Kecamatan Sukodono memiliki 5.705 UMKM yang mempunyai bermacam-macam sektor jenis usaha yang diusahakan, walaupun tidak tersentra dalam kampung-kampung UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan UMKM di Kecamatan Sukodono masih membutuhkan perhatian dari pemerintah khususnya dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan untuk itu

diperlukan strategi dalam upaya pemberdayaannya. Karena itu strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Kecamatan Sukodono mempunyai posisi yang cukup strategis dalam hal perekonomian, yang mana dekat dengan jalan utama sebagai pintu masuk atas mobilisasi orang dan barang dari wilayah Timur Provinsi Jawa Timur ke Kota Surabaya. Terminal Purabaya di Bungurasih merupakan fasilitas untuk mobilisasi orang serta tumbuhnya beberapa kawasan perdagangan, seperti Puspa Agro, yang merupakan pasar induk hasil-hasil produksi bidang pertanian di wilayah Propinsi Jawa Timur bahkan wilayah Indonesia Timur. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial di Kecamatan Sukodono merupakan potensi yang cukup besar dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai pendukungnya dalam kegiatan perekonomian, termasuk salah satunya adalah strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di dalamnya.

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan menggembirakan [1]. Peranan dan kegiatan usaha sektor UMKM sejak krisis ekonomi melanda negeri kita. Mengingat UMKM sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional maka perlu dilakukan strategi dalam upaya pemberdayaan pada sektor tersebut. Kebijakan pemberdayaan sektor UMKM diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor.

Diklat *Strategic Planning For Development*) menyatakan, *Community Based Economic Development (CBED)* menyebutkan strategi dan proses penguatan prakarsa dan kemampuan sekelompok masyarakat agar mereka dapat mengenali, merumuskan dan mencari sendiri terhadap masalah ekonomi yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat membangun kemampuan ekonomi mereka, yang dalam jangka panjang dapat menguatkan kemampuan sosial ekonomi mereka secara integratif [2]. Esensi dari *CBED* adalah sebagai human service delivery bagi sekelompok masyarakat "tertentu" dengan cara memberikan kesempatan, melakukan pemberdayaan dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan

sosial ekonomi yang telah dan sedang mereka tekuni.

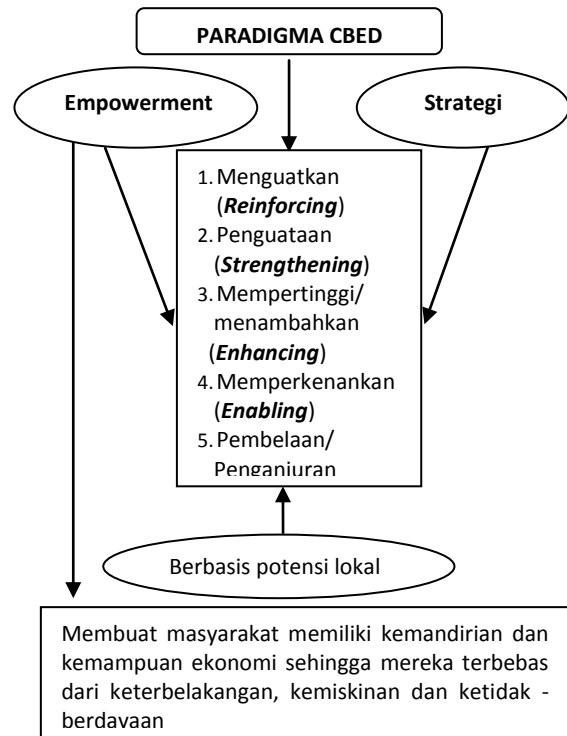
Selanjutnya Saleh menyatakan , Strategi *Community Based Economic Development* dapat dilakukan melalui ;

1. Peningkatan pengetahuan, Peningkatan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengenali dan memahami terhadap kekuatan dan kelemahan dalam ekonomi lokal dan aset ekonomi potensial yang masih tersembunyi
2. Penerapan gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan yang menyatukan sumber daya manusia, pengetahuan dan dana dari pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka memenuhi tujuan umum.
3. Pemberian Bantuan, Pengiriman bantuan dan/atau jasa kepada daerah yang kegiatan industri perorangan dan lembaganya masih belum bisa memenuhi kebutuhan daerahnya

TUJUAN *Community Based Economic Development* adalah ;

1. Memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat terbesar dalam mengembangkan dan membangun ekonominya.
2. Memastikan pembangunan ekonomi mampu menanggulangi permasalahan lokal atau meningkatkan potensinya
3. Memastikan pembangunan yang digagas oleh masyarakat semakin murah karena efisiensi meningkat dan biaya semakin rendah
4. Memastikan pembangunan ekonomi lokal akan sejalan dengan visi dan misi masyarakat setempat.
5. Memastikan bahwa keterampilan, kapasitas dan jaringan warga komunitas dalam pembangunan semakin meningkat

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangun di daerah, termasuk aparatur, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat [3]. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemerintah daerah [4].



Gambar 1. Paradigma *Community Based Economic Development*

Sumber: Bahan Diklat *Strategic Planning For Development* Saleh (2013)

Dengan memperhatikan tujuan dari *Community Base Economic Development* diatas, maka strategi pemberdayaan UMKM yang akan dilaksanakan sasaran/prioritas pemberdayaan dan pengembangannya, seperti terlihat pada Gambar 2.

Penting



Gambar 2. Penetapan Sasaran/Skala Prioritas Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

Sumber: Bahan Diklat *Strategic Planning For Development* Saleh (2013)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menekankan pada proses pencarian dan pengungkapan makna dari fenomena yang terjadi dalam UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecamatan Sukodono dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan ekonomi yang berbasis potensi setempat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Untuk menganalisis gambaran objek secara umum namun utuh tentang objek penelitian tersebut maka peneliti menggunakan Teknik Analisis Domain. Melalui analisis ini diharapkan akan memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti dalam penelitian [5]. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Spradley yang menyarankan penggunaan hubungan semantik yang bersifat universal dalam analisis domain yaitu, jenis (*strict inclusion*), ruang (*spatial*), sebab akibat (*cause-effect*), rasional (*rationale*), lokasi kegiatan (*location for action*), cara ke tujuan (*means-end*), fungsi (*function*), urutan (*sequence*), atau atribut (*attribution*) [6].

Metode Pengumpulan Data

Dalam Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan baik secara terbuka dan terstruktur, terhadap pejabat-pejabat dan staf Bagian Perekonomian, Bappeda Kabupaten Sidoarjo serta pelaku UMKM. Pada saat penelitian, pertanyaan memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini akhirnya mampu mengorek kejujuran dan obyektivitas informan untuk memberikan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menghindari bias informasi, peneliti melengkapi dengan instrumen dan perekam agar data dan informasi dapat ditangkap secara utuh. Hal ini dilakukan agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap bagaimana langkah-langkah yang tepat dan hasil yang dicapai dari strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pelaku UMKM di kecamatan Sukodono.

b. Observasi

Teknik observasi baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mengamati berbagai kegiatan mereka dalam melaksanakan usaha industri kerajinan batik tulis, mengamati upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan UMKM di Kecamatan Sukodono dan situasi kerja lain, serta peristiwa-peristiwa unik yang terjadi selama observasi yang mengandung kebenaran empirik dibalik peristiwa itu dalam rangka melengkapi data primer di lapangan dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen yang ada pada masing-masing situsnya (lokasi penelitian). Dokumen sebagian besar diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat potensi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono ini lebih mengarah kepada pembangunan manusia, yaitu ketrampilan dalam menjalankan usahanya serta jumlah pengrajin dan pengusaha yang cukup memadai untuk dikembangkan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, maka pembangunan ekonomi rakyat ini lebih dipusatkan pada pembangunan manusianya, yaitu pembangunan melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan [7], termasuk di Kecamatan Sukodono ini. Sebagaimana paradigma pemberdayaan, UMKM di Kecamatan Sukodono mempunyai asumsi bahwa dengan pemberdayaan, pembangunan/pertumbuhan usaha pelaku UMKM akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumberdaya yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat serta kesejahteraannya. Salah satu implementasi pemberdayaan di Kecamatan Sukodono adalah dengan dilaksanakannya Strategi pemberdayaan yaitu pembangunan yang berbasis pada potensi masyarakat setempat, utamanya strategi

pemberdayaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis komunitas yaitu:

1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 2. Penyederhanaan perijinan usaha
 3. Pengembangan jaringan kemitraan dengan stakeholders
 4. Promosi produk unggulan
1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Untuk menciptakan wirausaha baru (pelaku UMKM), maupun pengembangan dan pemberdayaannya salah satunya lewat kegiatan pelatihan kewirausahaan. Di Kecamatan Sukodono sudah pernah melaksanakan kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM antara lain:
 - a. Pelatihan membuat khas Sidoarjo, dengan mengirimkan 6 orang pelaku UMKM di Sentra Batik Jetis Sidoarjo di fasilitasi oleh Badan Keluarga Bencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBMPMP)
 - b. Pelatihan Glass painting, dengan mendatangkan narasumber/pelaku usaha Glass painting yang berhasil untuk memberi pelatihan usaha tentang glass painting bagi pelaku UMKM sebanyak 40 orang di Kecamatan Sukodono bekerjasama dengan Diskoperindag UMKM dan ESDM
 - c. Pelatihan menjahit dan border dengan mendatangkan narasumber dari SKPD terkait untuk memberi pelatihan usaha tentang menjahit dan bordir bagi pelaku UMKM sebanyak 25 orang di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono difasilitasi oleh Dinsosnaker
 - d. Pelatihan ternak ikan Lele dengan mendatangkan narasumber Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur bagi pelaku usaha ternak ikan Lele di desa Cangkringsari sebanyak 20 orang.
 2. Penyederhanaan perijinan usaha
Pada layanan perijinan, upaya yang telah dilakukan adalah melalui penyederhanaan prosedur dan pelayanan satu atap. Dari hasil dari wawancara dan observasi di lapangan ternyata cukup banyak pelaku UMKM yang telah mendapat sosialisasi tentang kemudahan mengurus ijin usaha, baik dengan mengikuti sosialisasi atau berdasarkan informasi dari pengrajin lain. Di Kecamatan Sukodono pernah dilaksanakan sosialisasi perijinan sekaligus, Work Shop dan One Day Service untuk jenis perijinan SIUP, TDP dan NPWP. Sosialisasi Perijinan dan kegiatan One Day Service .

3. Pengembangan jaringan kemitraan dengan stakeholders

Masalah permodalan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, tidak terkecuali bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan aksesibilitas permodalan bagi pelaku UMKM. Adapun Program-program yang dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan adalah melalui bantuan pinjaman dana lunak dan bantuan dana hibah serta temu bisnis untuk menggalang kemitraan dengan pihak swasta.

Salah satu kegiatan yang mendukung aksesibilitas permodalan bagi UMKM adalah pemberian bantuan Dana Bergulir. Program dijalankan oleh dua SKPD yaitu Dinas Koperindag & ESDM (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral) serta DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Alokasi Anggaran yang tersedia adalah Rp. 7 Milyar. Bantuan dana dilakukan dengan sistem pinjaman dana bergulir dengan bunga pinjaman sebesar 6% per tahun atau hanya 0,5% per bulan. Proses pengajuan pinjaman serta verifikasi dilakukan oleh Diskoperindag & ESDM, sedangkan pencairan pinjaman dilakukan oleh DPPKAD. Bantuan pinjaman ini diberikan kepada para pelaku UKM modalnya masih kecil dan mempunyai minat serta membutuhkan pinjaman modal tersebut. Namun karena banyak pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang mengajukan pinjaman sehingga banyak juga pelaku UMKM yang harus gigit jari karena sudah habis dipinjam pelaku UMKM lainnya atau tidak lolos verifikasi dilakukan oleh Diskoperindag & ESDM,

Karakteristik pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono dari segi permodalan masih berpegang teguh dengan modal sendiri, terlihat pada animo mereka pada program tersebut. Pada tahun 2013 jumlah pelaku UMKM Kecamatan Sukodono yang mengajukan proposal pinjaman dana bergulir hanya ada 5 orang, sedangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan pinjaman modal ini kepada 1 pelaku UMKM yang sebelumnya telah dinilai kelayakannya untuk mendapatkan pinjaman permodalan. Keterangan yang dihimpun di lapangan para pengrajin tidak terlalu antusias mengajukan pinjaman meski dengan bunga yang sangat rendah karena enggan dengan proses yang berbelit-belit. Mereka menganggap jumlah pinjaman yang hanya

sebesar Rp. 5 – Rp. 10 juta tidak sepadan dengan proses yang panjang.

Sedangkan Pemerintah Kecamatan Sukodono pernah menggelar kegiatan yang mendukung aksesibilitas permodalan bagi UMKM, dengan mengadakan kegiatan temu wicara dan fasilitasi perbankan pada tahun 2011 dengan pihak BRI Unit Sukodono, dan pada tahun 2012 dengan pihak Bank Bukopin Cabang Sidoarjo. Hasil dari kegiatan memang banyak direspon oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono, namun akhirnya banyak peserta temu wicara dan fasilitasi perbankan tersebut mayoritas kecewa karena dipusingkan dengan proses administrasi dan persyaratan yang berbelit-belit dan susah untuk dipenuhi oleh para pelaku UMKM.

4. Promosi produk unggulan

Mengatasi adanya keterbatasan pemasaran pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono, serta persaingan yang tidak sehat dari para pelaku UMKM, peningkatan aksesibilitas pada pasar yang telah dilakukan pemerintah melalui pameran dan promosi produk-produk unggulan daerah, temu bisnis, pembuatan leaflet dan pembinaan pengemasan. Upaya promosi dilakukan dengan mengikuti pameran di dalam daerah, seperti pada saat hari Koperasi, ataupun pameran di pendopo kabupaten setiap ada tamu dari luar daerah atau dari luar negeri. Promosi produk unggulan juga bisa dengan mengikuti pameran di luar daerah yang potensial pada moment-moment tertentu, seperti pada *Event* Sidoarjo Festival yang menjadi tolok ukur penting bagi kemajuan UMKM di Kabupaten Sidoarjo, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM karena ada seratus stan yang diperuntukan pelaku UMKM tanpa dikenakan biaya apapun alias gratis guna mengenalkan produk-produk unggulannya untuk dipamerkan/dipasarkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan daerah, menjangkau konsumen dan menggali kontak dagang serta mengikuti perkembangan pasar. Pada kegiatan ini sasaran peserta yang diikutkan dalam kegiatan ini lebih diperluas, tidak hanya yang sudah mengikuti kegiatan pameran secara aktif saja, tetapi juga kepada para pelaku UMKM yang belum berdaya dan belum mengikuti pameran lebih didorong dan dimotivasi untuk mengikutinya.

Strategi dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Sukodono, Strategi pemberdayaan UMKM berbasis

komunitas di Kecamatan Sukodono dapat di *break down* menjadi tiga aspek, yaitu:

1. Membangun daya tarik. Daya tarik diperlukan untuk meningkatkan investasi. Investasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi daerah, yaitu (1) kelembagaan, (2) sosial politik, (3) perekonomian daerah, (4) tenaga kerja dan produktifitas, serta (5) infrastruktur fisik. Faktor kelembagaan yang dimaksud adalah kepastian hukum; aparaturnya dan pelayanan; keuangan daerah dan peraturan daerah. Faktor sosial politik yang dimaksud adalah keamanan dan sosial budaya masyarakat. Faktor perekonomian daerah yang dimaksud adalah potensi ekonomi dan struktur ekonomi. Faktor ketenagakerjaan yang dimaksud adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif dan berpengalaman serta tenaga kerja pencari kerja; biaya tenaga kerja berdasarkan aturan formal dan aktual serta produktifitas tenaga kerja. Yang terpenting dari kesemua faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi adalah faktor infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan faktor yang utama, seperti ketersediaan jalan, terminal, pelabuhan udara, sarana komunikasi dan ketersediaan listrik.
2. Membangun daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan menyesuaikan diri serta memulihkan diri dari tekanan-tekanan faktor ekonomi maupun non ekonomi. Dalam lingkungan yang senantiasa berubah dimana peluang dan resiko dapat muncul setiap saat, setiap unit ekonomi perlu mempersiapkan diri. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui diversifikasi produk serta pengembangan jiwa kewirausahaan.
3. Membangun daya saing. Disamping menghadapi era globalisasi, tantangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah adalah demokratisasi dan desentralisasi atau otonomisasi. Demokratisasi dicirikan oleh kebebasan berfikir, berkata, dan bertindak. Demikian juga dalam era otonomisasi dimana peran pemerintah pusat tidak seperti pada era sebelumnya yang sentralistis. Masing-masing daerah bebas mengembangkan kreasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Oleh karenanya beberapa hal yang menjadi poin penting guna mampu membangun daya saing daerah, yaitu (1) harus selalu kreatif, inovatif, dan mampu

memahami perubahan yang terjadi; (2) mampu menggali dan mengembangkan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan yang komparatif menjadi keunggulan kompetitif, (3) adanya komitmen bersama untuk mengembangkan pengrajin baru yang memiliki semangat dan jiwa kewirausahaan yang tinggi

Ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa Strategi pemberdayaan UMKM merupakan program lintas sektoral dan membutuhkan koordinasi antar SKPD. Sebagai salah satu implementasi dari pemberdayaan UMKM di Kecamatan Sukodono, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membentuk beberapa cluster sentra atau kampung UMKM yang diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat. Seperti 1) Kampung Bebek dan Telur Asin, 2) Kampung Lele Kedungbocok, 3) Kampung Batik Tulis Jetis 4) Kampung pot Bunga , 5) Kampung Jamur, 6) Kampung Sepatu & sandal, 7) Kampung Kerupuk, 8) Kampung Jajanan, 9) Kampung Sayangan 10) Kampung ikan Asap, dan 11) Kampung Tas dan Koper Kulit Tanggulangin.

Dilihat dari beberapa pendekatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam strategi pemberdayaan UMKM menggunakan pendekatan yang terakhir. Peran Pemerintah dalam hal ini sebagaimana pendapat Cornelis dan Miar (2005:84), adalah untuk memfasilitasi dan memberdayakan para pelaku UMKM yang belum berdaya menuju ke tingkat lebih berdaya, dan yang sudah berdaya dikembangkan kearah yang lebih maju serta diharapkan mampu mengangkat para pengusaha yang belum berdaya tersebut dan tentunya harus ada peran aktif serta partisipasi masyarakat didalamnya serta dapat memberikan hasil yang lebih baik, sedangkan dilihat aspek tujuan yang hendak dicapai strategi pemberdayaan yang digunakan adalah strategi pemberdayaan berbasis komunitas seperti pada paradigma *Community-Based Economic Development (CBED)* Strategi *Community Based Economic Development* meliputi: [2]

1. Peningkatan pengetahuan, Peningkatan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengenali dan memahami terhadap kekuatan dan kelemahan dalam ekonomi lokal dan aset ekonomi potensial yang masih tersembunyi
2. Penerapan gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan yang menyatukan sumber daya manusia, pengetahuan dan dana dari pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka memenuhi tujuan umum.

3. Pemberian Bantuan, Pemberian bantuan dan/atau jasa kepada daerah yang kegiatan industri perorangan dan lembaganya masih belum bisa memenuhi kebutuhan daerahnya. Selanjutnya Saleh menyatakan, *CBED* mempunyai Tiga Fungsi Utama yaitu ;

1. Bagi Pemerintah: Mengarahkan tindakan Pemerintah & PEMDA untuk bertindak tepat sasaran & efisiensi agar program pembangunan ekonomi lebih terjamin, karena masyarakatlah yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri
2. Bagi Masyarakat Menguatkan rasa tanggung jawab bagi selompok masyarakat/ komunitas agar mereka selalu berorientasi untuk menuju kepada kemandirian ekonomi masyarakat yang kuat yang berasaskan kegotong royongan (Kerjasama)
3. Bagi Masyarakat menyadarkan kepada masyarakat agar mereka dapat getahui dan memahami tentang apa yang sebenarnya menjadi kebutuhannya, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, mobilisator dan dinamisator saja.

Harapan yang ingin dicapai adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono bisa dikembangkan, agar lebih maju dan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari penetapan sasaran / skala prioritas dalam strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas yang ada di Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

1. Penting dan Mendesak (Prioritas I)
2. Mendesak, tetapi Tidak penting (Prioritas- II)
3. Penting , tetapi Tidak mendesak (Prioritas III)
4. Tidak Penting dan Tidak Mendesak (Prioritas IV).

Jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang tersebar di 19 desa dan perlu mendapat perhatian serta penataan segenap potensi yang dimilikinya dalam strategi pemberdayaan yang akan dilakukan, agar dapat memiliki daya saing dalam era pasar global saat ini seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kecamatan Sukodono

No	Desa	Jenis UMKM			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Anggaswangi	185	54	10	249
2	Bangsri	190	30	7	227
3	Cangkringsari	193	49	9	251
4	Jumputrejo	203	61	11	275

No	Desa	Jenis UMKM			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
5	Jogosatru	289	58	16	363
6	Kebonagung	579	72	21	672
7	Klopo sepuluh	248	37	15	300
8	Masangan Kulon	477	83	36	596
9	Masangan Wetan	49	18	5	72
10	Ngaresrejo	119	32	9	160
11	Pademonegoro	148	41	11	200
12	Panjunan	152	59	16	227
13	Pekarungan	199	82	19	300
14	Plumbungan	126	17	13	156
15	Sambungrejo	119	28	8	155
16	Suko	489	112	73	674
17	Sukodono	407	86	28	521
18	Suruh	129	27	8	164
19	Wilayut	109	22	12	143
Jumlah UMKM		4410	968	327	5705

Sumber: Direktori Kec. Sukodono 2011

Prioritas penting dan mendesak (Prioritas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 4.410 pelaku (77,3%). Selain itu pelaku UMKM/komunitas usaha dengan skala mikro memiliki problema yang dihadapi sangat kompleks dan sumberdaya yang dimiliki sangat besar dan potensial, problema yang utama dihadapi adalah masalah Sumber daya Manusia (SDM). Dengan kondisi yang demikian maka sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Sukodono memikirkan perencanaan yang cocok bagi strategi pemberdayaannya dengan melihat segala potensi sumberdaya yang dimiliki para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono. Selanjutnya pada skala prioritas II yaitu Mendesak tapi tidak penting dilakukan pada pelaku UMKM/komunitas usaha dengan skala kecil dengan jumlah pelaku sebanyak 968 pelaku (17%) karena para pelaku UMKM pada skala ini memiliki problema tidak sekomplek yang dihadapi pada pelaku UMKM skala mikro dan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki SLTA ke atas, dengan asumsi aspek SDM sudah jarang ditemui problema yang kompleks. Problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah

permodalan dan pemasaran. Sedangkan pada skala prioritas III yaitu Penting tetapi tidak mendesak dilakukan pada pelaku UMKM/komunitas usaha dengan skala menengah karena memang jumlahnya tidak sebanyak pada pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Walaupun demikian juga perlu dilakukan pemberdayaan agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang kuat di bursa pasar yang penuh persaingan di era global saat ini, apalagi para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono belum terbangun dalam sentra atau kampung-kampung UMKM seperti di daerah lainnya di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. Penetapan sasaran/skala prioritas Dalam strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas di Ke. Sukodono

No	Sasaran/skala prioritas	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Penting dan Mendesak (Prioritas I)	Banyaknya pelaku sejumlah 4.410 (77,3%), juga permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan kompleks		
2	Mendesak tetapi tidak penting (Prioritas II)		Banyaknya 968 pelaku (17%) permasalahan yang dihadapi tidak sebanyak pelaku Usaha Mikro	
3	Penting, tetapi Tidak mendesak (Prioritas III)			Banyaknya 327 pelaku (5,7%) permasalahan yang dihadapi tidak banyak seperti pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil
4	Tidak Penting dan Tidak Mendesak (Prioritas IV)			-

Melihat kondisi eksisting UMKM di Kecamatan Sukodono yang belum mempunyai sentra atau kampung-kampung UMKM dalam jenis usahanya. Namun apabila menginginkan pengembangan dan kemajuan usahanya maka perlu dipikirkan untuk bermitra dengan UMKM yang sudah mempunyai sentra atau kampung UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. dan perlu dipikirkan segala aspek penunjangnya. Untuk itu

ke depan dalam merencanakan strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis "Community Based Economic Development" utamanya kepada UMKM dan perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Apabila menginginkan para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono lebih berdaya dibanding dengan daerah lain, maka perlu dipikirkan segala aspek penunjangnya. Dalam Strategi pemberdayaan UMKM yang perlu dilakukan di Kecamatan Sukodono oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah yang berbasis "Community Based Economic Development." Dimana yang merupakan prioritas penting dan mendesak (Prioritas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM/komunitas usaha pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak yaitu sejumlah 4.410 pelaku (77,3%). Selain itu pelaku UMKM pada skala mikro memiliki problema yang dihadapi sangat kompleks dan sumberdaya yang dimiliki sangat besar dan potensial, problema yang utama dihadapi adalah masalah Sumber daya Manusia (SDM). Dengan kondisi yang demikian maka sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Sukodono memikirkan perencanaan yang cocok bagi strategi pemberdayaannya dengan melihat segala potensi sumberdaya yang dimiliki para pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono. Selanjutnya pada skala prioritas II yaitu Mendesak tapi tidak penting dilakukan pada pelaku UMKM/komunitas usaha dengan skala kecil dengan jumlah pelaku sebanyak 968 pelaku (17%) karena para pelaku UMKM pada skala ini memiliki problema tidak sekompleks yang dihadapi pada pelaku UMKM skala mikro dan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki SLTA ke atas, dengan asumsi aspek SDM sudah jarang ditemui problema yang kompleks sudah tidak memiliki problema yang berarti. Problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah permodalan dan pemasaran. Sedangkan pada skala prioritas III yaitu Penting tetapi tidak mendesak dilakukan pada pelaku UMKM/komunitas usaha dengan skala menengah karena memang jumlahnya tidak sebanyak pada pelaku UMKM skala mikro dan kecil. Walaupun demikian juga perlu dilakukan pemberdayaan agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang

kuat di bursa pasar yang penuh persaingan di era global saat ini.

Saran

Strategi pemberdayaan UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan lebih baik dan tepat sasaran, maka perlu didukung pula dengan pendataan yang lebih baik. Dalam hal ini termasuk pembuatan data base, sehingga kondisi UMKM di Kecamatan Sukodono dapat dilihat secara jelas serta lebih mudah untuk penentuan sasaran yang dituju dalam pelaksanaan program-program maupun kegiatan. Program dan kegiatan yang dibuat harus disesuaikan dengan sentra, agar upaya pembinaan tidak tumpang tindih dan dapat mereduksi ego sektoral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya tulisan ini, terutama SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Sukodono.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Manning, Cris dan Tajuddin Noer. 1989. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Gramedia, Jakarta
- [2]. Saleh, Choirul. 2013. Bahan DIKLAT Strategic Planning For Development
- [3]. Cook, Sarah and Steve Macaulay. 1997. *Pemberdayaan yang Tepat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [4]. Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- [5]. Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* (cetakan ketujuh). CV. Alfabeta. Bandung.
- [6]. Bungin, Burham. M.H. 2010. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- [7]. Siagian, P, Sondang. 1999. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. PT Bumi Aksara cetakan ke 8, April 2012. Jakarta.
- [8]. Cornelis dan Miar, 2005, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: BPFE
- [9]. Bappeda dan BPS Kabupaten Sidoarjo. 2012b. *Kecamatan Sukodono dalam Angka 2012*.
- [10]. Kecamatan Sukodono, 2011. Direktori Kecamatan Sukodono 2011. Sidoarjo